BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan secara mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri, dengan mengandalkan sumber daya yang ada pada Desa itu sendiri. Pada dasarnya Desa merupakan pemerintahan yang paling rendah di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota dengan status yang berbeda. Dalam hal ini Desa menjadi subjek dari pembangunan nasional karena program-program dalam pembangunan Desa mampu memperkuat struktur pemerintahan Nasional.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Dalam hal ini desa bukan lagi menjadi objek pembangunan yang jalan kehidupannya tergantung pada pusat namun desa sekarang mampu mengelola ekonomi masyarakat mereka sendiri dan desa sudah menjadi unit pemerintahan yang tatacara pemerintahannya mereka

kelola sendiri sebagai subjek pembangunan. Karena itu masyarakat desa mendapatkan ruang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Maka dari itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) desa diberikan kewenangan untuk menyusun program-program kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun desa.

Berdasarkan penelitian (Maryani & Rusmianto, 2018) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menjadi kunci utama pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini masyarakat Desa dibutuhkan perannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat membantu dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perlunya upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Menurut (Adi, 2007) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masyarakat dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi dari setiap lapisan masyarakat Desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan untuk kemajuan masyarakat Desa. Dalam hal ini partisipasi tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, namun masyarakat juga diikut sertakan dalam pengidentifikasian masalah dalam desa dan potensi yang ada dalam masyarakat Desa. Tanpa partisipasi dari masyarakat maka program pembangunan akan gagal, maka dari itu peran masyarakat dalam program-program pembangunan yang telah direncanakan sangat penting. Pelibatan masyarakat dalam program pembangunan desa

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dilakukan di Desa.

Dalam era ini pemerintah pusat memfokuskan pada Pembangunan Nasional, hal ini membuat pemerintah menjadikan Desa sebagai pusat dari pembangunan Nasional. Karena Desa mampu memperkuat lembaga pemerintahan Nasional melalui struktur pemerintahan yang telah dijaga oleh masyarakat Desa yang bersangkutan. Karena itu peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang telah direncanakan, karena keikutsertaan masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan dari pembangunan Nasional.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes pada wilayah Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Alasan peneliti memilih Peran Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan APBDes karena dalam proses penyusunan APBDes di Desa Karanglo diterapkan penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji peran partisipasi masyarakat Desa Karanglo dalam mengikuti proses penyusunan APBDes.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Karanglo dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karanglo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh informasi maupun bukti tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang berada di Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karanglo.

1.4 Manfaat Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes di Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi masukan Pemerintah Desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

- b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang Peran Partisipasi

Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes).

2. Manfaat teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan untuk berbagai literatur ekonomi khususnya pada bidang Akuntansi Sektor Publik mengenai Peran Partisipasi Masyarakat yang berpengaruh untuk proses penyusunan dan perencanaan APBDes.